



Rekrutmen CPNS

Belum Siap

JOGJA—Proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 terhambat karena banyak daerah belum mendapat formasi final pegawai yang dibutuhkan.

Sunartono, David Kurniawan, & Fahmi Ahmad Burhan
redaksi@harianjogja.com

► Ketidaksinkronan formasi terlihat di beberapa daerah di DIY.

► Baru 16 instansi yang sudah mengumumkan informasi terperinci ihwal rekrutmen CPNS

Formasi CPNS sedianya diumumkan di web <https://socr.bkn.go.id>, Rabu (19/9). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB) sebelumnya menyatakan pendaftaran akan dimulai kemarin.

Namun, baru segelintir instansi daerah dan Pusat yang sudah memiliki formasi final penerimaan CPNS tahun ini. Laman pendaftaran CPNS juga baru bisa diakses Rabu pukul 13.00 WIB.

Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi mengatakan formasi CPNS di provinsi ini masih direvisi Kempan-RB hingga Rabu siang. Meski demikian, kuota penerimaan sebanyak 3.132 CPNS tidak dikurangi maupun ditambah.

Formasi diubah karena ketidaksesuaian kebutuhan jenis pegawai yang diajukan daerah dengan lowongan pegawai yang disetujui Kempan-RB la mencantumkan, sejumlah formasi yang sebenarnya punya cukup PNS justru diberi kuota. Akhirnya, kuota itu dialihkan ke formasi yang masih kekurangan sumber daya manusia.

"Saat ini masih proses revisi dan pendaftaran paling cepat tanggal 26 (September 2018)," kata dia. Pemda DIY juga masih membentuk panitia daerah. Para pendftar hanya bisa mendaftar pada satu formasi di seluruh Indonesia. Sementara, persyaratan ditentukan oleh kepala daerah.

Menurut dia, pemerintah daerah bisa mengajukan syarat yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan, tetapi perbedaannya tidak boleh terlalu jauh.

"Saya tidak mengatakan syarat harus sama, mungkin bisa beda tetapi jangan terlalu signifikan," kata dia.

Masih Sedikit
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat baru 16 instansi yang telah melaporkan informasi mengenai pendaftaran dan persyaratan CPNS. Sementara, 509 instansi tingkat daerah dan Pusat belum menyerahkan formasi dan ketentuan rekrutmen kepada BKN.

► Halaman 6

Instansi	Tindak Lanjut
1.	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2.	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3.	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4.	
5.	

Yogyakarta,
 Plt. Kepala Sekretaris
 Ttd
Ig. Trihastono, S.Sos, MM
 NIP. 19690723 199603 1 005

BKPP
 Normal
 Proses
 untuk dibelak

Rekrutmen CPNS...

Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan BKN Mohammad Ridwan mengatakan tahun ini sebanyak 525 pemerintah daerah dan 76 kementerian serta lembaga yang membutuhkan tenaga baru. Namun baru sebagian kecil saja yang tertib melaporkan informasi CPNS tepat waktu.

"Sampai pukul 08.30 WIB baru ada 16 instansi yang menyediakan informasi pendaftaran, pelamaran dan sebagainya itu di web <https://sscn.bkn.go.id>," kata Ridwan.

Dia tidak mengetahui secara rinci pemerintah daerah atau kementerian mana saja yang sudah melaporkan informasi secara lengkap ataupun belum.

Menurut dia, penerimaan CPNS sudah dipersiapkan sejak beberapa bulan lalu. Pemerintah daerah dan Pusat pun telah diminta untuk mengunggah informasi ke sistem terpadu milik BKN sejak awal, tetapi ditemukan banyak kendala.

"Proses sudah dimulai sejak April, seharusnya enggak lama-lama. Banyak instansi yang harus melakukan revisi," kata dia.

Akibatnya, pendaftaran CPNS diundur menjadi 26 September. Ridwan mengatakan ada kekeliruan persepsi mengenai permintaan Kemenpan-RB untuk membuka pendaftaran CPNS mulai Rabu kemarin.

19 September bukan awal dimulainya pendaftaran, tetapi kewajiban bagi semua instansi untuk mengumumkan lowongan penerimaan CPNS di masing-masing lembaga, baik melalui portal instansi maupun media massa. Mereka juga harus menyediakan informasi yang sama di situs SSCN BKN.

Pada dua pekan di awal September, BKN mengharapkan penetapan formasi oleh Kementerian PAN-RB di seluruh instansi. Kemudian, formasi diumumkan dan setelah itu pendaftaran dibuka.

"Hari ini, masyarakat memang baru bisa melihat [sebagian] formasi dan persyaratan lowongan serta membuat akun untuk pendaftaran," kata dia.

Setelah pendaftaran pada 26 September, instansi yang dituju akan memverifikasi data pelamar. Pada 16 Oktober, pelamar yang berhak ikut Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diumumkan. Pelamar yang lolos tes ini akan ikut tes SKD dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada 20 Oktober. Pelamar dengan nilai tertinggi diterima sebagai CPNS. Nama-nama pelamar yang diterima akan diumumkan pada 30 November 2018.

Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB Mudzakir

Problem di Daerah

Ketidaksinkronan formasi yang butuh tenaga dan jatah yang diberikan Kemenpan-RB terlihat di beberapa daerah di DIY. Kepala Bidang Formasi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul Triyanto mengatakan masalah paling mencolok dalam rekrutmen kali ini adalah informasi yang belum jelas. Sebagai contoh, dalam formasi CPNS 2018, ada lowongan guru di SD Monggang, tetapi ada dua sekolah dengan nama yang sama dan berbeda kecamatan.

"SD Monggang ada dua. Satu di Kecamatan Sewon dan satunya lagi di Pundong. Jadi kami harus melakukan revisi agar jelas kuota yang dibutuhkan di mana sehingga nanti kami tidak salah dalam menempatkan," kata dia.

Pemkab Sleman juga belum mendapat kepastian ihwal formasi CPNS untuk jalur khusus penyandang disabilitas dan lulusan perguruan tinggi berpredikat *cum laude*.

"Kami memang sudah mendapat kuota 628 CPNS, tetapi kita masih berkoordinasi dengan provinsi [Pemda DIY] mengenai formasi CPNS dari disabilitas dan *cum laude*, jadi belum *fix* [pasti]," ujar Sekda Sleman Sumadi.

Pemkab Sleman mengupayakan formasi untuk difabel 1% atau 6 lowongan. Sementara, untuk *cum laude* yaitu 5%.

Kepala BKPP Kulonprogo Yurianti informasi formasi CPNS sudah diumumkan, tetapi belum terperinci. "Persyaratan umum secara nasional sama, tetapi persyaratan khusus di masing-masing kabupaten atau kota di DIY perlu disamakan," kata dia.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul Sigit Purwanto mengatakan Gunungkidul butuh sekurangnya 2.500 PNS baru untuk mengganti ratusan PNS yang pensiun saban tahun. Namun, Kemenpan-RB hanya memberi jatah 434 CPNS bidang tenaga pendidikan dan kesehatan. Adapun Kepala BKPP Kota Jogja belum mau memberikan informasi soal penerimaan CPNS di daerah ini.

(Uli Febrilani & Abdul Hamid Razak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BKPP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005